

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEPABEANAN DI
BIDANG EKSPOR
(Studi Putusan PN Medan No 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn)

Jefri Usnaini

Perbuatan pemalsuan dokumen pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan lain yang diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana menggunakan pemberitahuan pabean yang memuat keterangan palsu, penegakan hukum tindak pidana menggunakan pemberitahuan pabean yang memuat keterangan palsu serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan pemberitahuan pabean yang memuat keterangan palsu dalam putusan No. 3981/Pid.B/2020/PN.Mdn.

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa pengaturan hukum tindak pidana menggunakan pemberitahuan pabean yang memuat keterangan palsu diatur Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penegakan hukum tindak pidana menggunakan pemberitahuan pabean yang memuat keterangan palsu adalah PPNS Bea dan Cukai memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan tembusan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan tembusan hasil penyidikan disampaikan kepada Penyidik Kepolisian. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana adalah tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa, setelah diperiksa terbukti telah melakukan perbuatan pemalsuan dokumen yang memuat keterangan palsu, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya maka pengadilan menjatuhkan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana, Pemberitahuan Pabean, Keterangan Palsu.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS IN THE CRIMINAL IMPOSITION OF PEOPLE OF CUSTOMS VIOLATIONS IN THE EXPORT SECTOR (Study of Medan District Court Decision No. 3981/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Jefri Usnaini

This act of falsifying customs documents has a very negative influence on several aspects of the survival of the nation and state, both directly resulting in losses in state revenue from import duties and other levies received by the government through the Director General of Customs and Excise, as well as losses that indirectly result in bottlenecks or obstacles to domestic production that cause harm to the government that produces it.

The problem in this thesis research is how to regulate the law of criminal acts using customs notifications that contain false information, law enforcement of criminal acts using customs notifications that contain false information and legal considerations by judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts using customs notifications that contain false information. in decision no. 3981/Pid.B/2020/PN.Mdn.

The research uses descriptive analytical research, the type of research used in this research is normative juridical using library research and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-analytical data.

The conclusion in this thesis research is that the legal regulation of criminal acts using customs notifications containing false information is regulated by Law no. 17 of 2006 concerning Customs. Law enforcement of criminal acts using customs notifications that contain false information is that the Customs and Excise PPNS notifies the start of the investigation and submits the results of the investigation to the Public Prosecutor and a copy of the notification of the start of the investigation and a copy of the results of the investigation is submitted to the Police Investigator. The legal consideration by the judge in imposing criminal sanctions is that the action was carried out jointly by the defendant, after examination it was proven that he had committed an act of falsifying documents containing false information, the defendant had never been convicted before, so the court sentenced each to 3 (three) years in prison. Imprisonment and a fine of 200 million rupiah each, provided that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months each.

Keywords : Criminal Impositions, Crimes, Customs Notifications, False Statements.